

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pelayanan pemerintahan yang baik. Salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah yaitu dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu informasi laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, tentunya pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, untuk pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah harus mampu dan bisa membuat laporan keuangan yang mengandung informasi

yang berkualitas, seperti yang tertera dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dikatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus bisa memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Untuk menentukan tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari seberapa baik sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Paradigma baru tentang otonomi daerah telah lahir sejak UU No. 23 Tahun 2014 diberlakukan yang membuat pemerintah daerah terus dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas, seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, untuk pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Menurut Dewi, *et al.*,(2020), pemerintah harus mampu dan bisa membuat laporan keuangan yang berisikan informasi yang berkualitas, seperti yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di dalamnya dijelaskan bahwa laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Prinsip akuntansi dan pelaporan salah satunya yaitu terdapat pada prinsip penyajian wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang wajar yaitu menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Keuangan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat dan disusun oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. Pada era saat ini pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Maka dari itu etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal, komitmen karyawan, tingkat pemahaman akuntansi serta fungsi badan pengawas akan membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Etika ada kaitannya dengan apa yang dilakukan pemimpin dan siapakah pemimpin itu. Hal itu terkait dengan karakter perilaku pemimpin dan dengan integritas mereka. Menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas, etika kepemimpinan sangat diperlukan. Prinsip kepemimpinan yang etis adalah pemimpin yang etis menghargai orang lain, pemimpin yang etis melayani orang lain, pemimpin yang etis itu objektif, pemimpin yang etis itu jujur, dan pemimpin yang etis membangun komunitas. Badan pemerintahan memerlukan seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik.

Dalam melakukan sebuah pekerjaan etika menjadi hal yang sangat penting dikarenakan bisa mempengaruhi hasil dari pekerjaan tersebut. Menurut Griffin (2006:58), etika diartikan sebagai percaya atau yakin dengan perbuatan yang baik dan salah, atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan yang baik dan buruk yang nantinya akan mempengaruhi hal yang lainnya. Suatu perilaku bisa

dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis bisa dilihat dari nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial.

Aparatur pemerintah dikatakan sebagai pelayanan publik yang berfungsi memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat untuk pengaturan dan pelayanan kebutuhan publik. Hasil penelitian dari Veliani, *et al.*,(2021) menemukan hasil bahwa etika kepemimpinan juga memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singing, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Sinaranata, *et al.*,(2019), Pratiwi, *et al.*,(2021) dan Andari, *et al.*,(2022) menyatakan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena laporan keuangan sudah sesuai dengan standar pelaporan dan sudah mengacu pada sistem akuntansi yang sudah ditetapkan.

Salah satu perangkat yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern adalah suatu prosedur yang dilaksanakan serta berkeinginan guna mengarahkan aktivitas pemerintahan dengan maksud mencapai cita - citanya. Pengendalian intern adalah salah satu prosedur guna mengukur, membimbing, serta menunjukkan kegiatan atasan serta seluruh staf guna membagikan jaminan yang memadai, agar pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pemerintah bertambah baik, efisien serta efektif tercapainya tujuan pemerintahan (Ika Sari & Priyadi, 2020). Pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi, berguna bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan-kecurangan dan mengamankan kekayaan perusahaan. Hasil penelitian Harun (2021) menjelaskan SPI tidak

mempengaruhi mutu pelaporan keuangan, sedangkan hasil penelitian Lestari, *et al.*, (2022) mengatakan SPI mempengaruhi mutu pelaporan keuangan dan hasil penelitian oleh Rohmah, *et al.*,(2020) mengatakan SPI mempengaruhi mutu pelaporan keuangan.

Selain sistem pengendalian internal, untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dengan adanya komitmen karyawan. Menurut Nugraha, *et al.*,(2014) dalam pengelolaan keuangan daerah agar bisa mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, komitmen karyawan sangat dibutuhkan dalam instansi pemerintah untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi dan juga untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah, sehingga bisa tercipta loyalitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam instansi pemerintah juga sangat dibutuhkan komitmen karyawan dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi, serta untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah agar tercipta loyalitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Seorang individu harus memiliki komitmen yang tinggi agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi. Komitmen afektif, komitmen kontinu, dan komitmen normatif menjadi indikator komitmen karyawan. Pada variabel komitmen karyawan juga masih banyak ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fibriyani, *et al.*,(2021) menemukan hasil bahwa komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah SKPD Kabupaten Gianyar. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Nugraha, *et al.*,(2021) menemukan hasil bahwa komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah SKPD Kota Bandung, sedangkan hasil penelitian Wati (2022) yang menyatakan bahwa komitmen karyawan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam membuat laporan keuangan, seorang akuntan harus memahami isi dalam laporan tersebut. Jika seorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam menyusun laporan keuangan. Menurut kamus umum bahasa indonesia, seseorang dapat dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti dan paham bagaimana suatu proses akuntansi dilakukan sehingga menjadi laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Suatu laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas apabila dapat menyajikan informasi di dalam laporan keuangan yang dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyimpang dan kesalahan material dan menyampaikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Suatu informasi laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi yang disajikan bisa mendukung pada saat pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakainya. Pada variabel tingkat pemahaman akuntansi juga masih banyak ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sutandi (2023) dan Fibriyani, *et al.*,(2021) menemukan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan hasil penelitian dari Atika, *et al.*,(2019) yang

menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan kota Medan.

Fungsi badan pengawas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Landya (2020), dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya dikerjakan oleh seorang akuntan tetapi akan dibantu oleh badan pengawas. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Menurut keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel maka pemerintah harus meningkatkan peran dan fungsi dari badan pengawas intern keuangan daerah. Dalam penelitian ini badan pengawas intern keuangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Inspektorat Daerah. Untuk saat ini inspektorat daerah diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Jadi salah satu cara melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi.

Pemerintah kemudian sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan dan bisa dilihat dari opini auditor. Pada variabel fungsi badan pengawas juga masih banyak ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Sutandi (2023) menghasilkan hasil bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan hasil penelitian dari Dewi, *et al.*, (2023) menemukan hasil bertentangan, hasil penelitian menemukan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena atau motivasi riset penelitian ini yaitu karangasem merupakan kabupaten di Bali dengan tingkat kepadatan penduduknya paling rendah akan tetapi tingkat penganggurannya besar dan termasuk dalam salah satu kabupaten miskin Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengatakan, persentase kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2022 masih menduduki posisi tertinggi diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali. Karakteristik penduduk miskin sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dengan penghasilan rendah, serta tingkat pendidikan yang rata-rata di bawah SMP, Ini juga yang disebut-sebut menjadi salah satu indikator penyebab tingginya persentase kemiskinan tersebut. Terkait hal ini, Wabup Artha Dipa mengajak semua komponen baik pemerintah maupun swasta untuk bergerak bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Website Pemerintah Kabupaten Karangasem).

Akan tetapi dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada pemerintah kabupaten karangasem setiap tahunnya mendapatkan predikat sangat baik, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah

kabupaten karangasem bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dilihat dari kondisi kabupaten karangasem pada saat ini yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di provinsi Bali.

Dilihat dari berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Khusus untuk Kabupaten Karangasem pernah mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat atas LKPD tahun 2010 dan 2013. Hal ini mencerminkan Kabupaten Karangasem masih memerlukan banyak perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam setiap laporan hasil pemeriksaan BPK. Namun dari tahun 2015-2023 Kabupaten Karangasem berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana keberhasilan ini menjadi keenam kalinya bagi Pemkab Karangasem mempertahankan WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dengan demikian, maka laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem naik satu tingkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tak lepas dari bantuan seluruh pihak terutama sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Karangasem sehingga laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana setiap tahunnya laporan keuangan Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan Kabupaten Karangasem sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut, Pengaruh Etika Kepemimpinan, Sistem

Pengendalian Internal, Komitmen Karyawan, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem (Studi Empiris Pada Seluruh Dinas Di Kabupaten Karangasem).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?
- 2) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?
- 3) Apakah komitmen karyawan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?
- 4) Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?
- 5) Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh komitmen karyawan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi studi, pengetahuan dan disiplin ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi khususnya dalam kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan bagi pengelola pemerintah daerah Kabupaten Karangasem mengenai pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah yang dapat memenuhi harapan masyarakat tentang penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik, tepat dan akurat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Agency Theory adalah perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para *agent* untuk bekerja sesuai dengan keinginan *principal*. Di Indonesia pada organisasi publik yaitu di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak teori keagenan ini telah dipraktekkan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (2000) Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebagai suatu versi dari game theory yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada prinsipal juga dapat dikatakan memastikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Wewenang dan tanggungjawab agen ataupun principal telah di atur di dalam kontrak kerja atas persetujuan kedua belah pihak. Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kemungkinan agen tidak selalu

bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dapat mendorong timbulnya biaya keagenan (Dewi, 2022).

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah berfungsi sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga dituntut untuk berlaku transparan dan juga melibatkan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk menciptakan dan menyajikan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*) dilihat dari hubungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan daerah. Pemerintah berperan sebagai agen untuk mengelola keuangan dengan baik, namun pengelolaan fiskal yang baik melibatkan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menetapkan kebijakan.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila

kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen. Dalam hubungan keagenan, pemerintah daerah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai principalnya.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran preskriptif yang harus diterapkan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Syarat agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diharapkan yaitu dengan memenuhi empat karakteristik yaitu:

1. Relevan

Jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini, memprediksi masa depan, dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan. Dengan cara ini informasi laporan keuangan akhir yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaan informasi yang relevan yaitu:

- 1) Memiliki keuntungan dari umpan balik (*feedback value*). Dengan kata lain, informasi ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfirmasi atau mengubah harapan masa lalu.

- 2) Memiliki nilai prediksi (*predictive value*), Informasi membantu pengguna memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa saat ini.
- 3) Tepat waktu, artinya informasi disajikan secara tepat waktu sehingga lebih berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin dan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan memperhatikan keterbatasan yang ada. Informasi menjadi latar belakang untuk setiap informasi material yang terkandung dalam laporan keuangan dan diungkapkan secara jelas dikemudian hari sehingga dapat menghindari adanya kesalahan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan tahunan yang dihasilkan bebas dari pengetahuan yang menyesatkan atau kesalahan material, benar dalam segala hal dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan jika sifat atau representasinya tidak dapat diandalkan. Informasi dapat dikatakan andal apabila bisa memenuhi karakteristik berikut:

- 1) Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diperiksa dan hasilnya menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda secara signifikan ketika pengujian dilakukan berkali-kali oleh pihak yang berbeda.
- 3) Netralitas, informasi ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak memihak pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan lebih bermanfaat bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan umum entitas pelapor lainnya. Perbandingan bisa internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan jika perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan ketika perusahaan yang sebanding menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Perubahan dapat diungkapkan dalam periode dimana perubahan terjadi jika agensi menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih unggul daripada yang digunakan saat ini.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pemakai dan disesuaikan dengan batas pemahamannya. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang baik tentang aktivitas dan lingkungan operasi perusahaan pelapor dan bersedia mempelajari informasi yang relevan.

2.1.3 Etika Kepemimpinan

Menurut Suseno Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Menurut Terry kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Jadi semakin tinggi etika yang dimiliki oleh pemimpin untuk mengontrol atau memberi arahan kepada pengikutnya, maka pemimpin tersebut akan lebih dipercaya oleh pengikutnya dan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, etika menjadi salah satu faktor keberhasilan terpenting dalam organisasi pemerintahan. Etika kepemimpinan dapat terwujud apabila :

- 1) Pemimpin memiliki sifat jujur kepada pengikutnya.
- 2) Pemimpin dapat dipercaya oleh para pengikutnya.
- 3) Dapat bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan dengan cara menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 4) Memiliki sifat adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain.
- 5) Dapat menerima saran dan kritik yang diberikan oleh pengikutnya.
- 6) Dapat menilai dan memahami kinerja para pengikutnya.
- 7) Memiliki hubungan yang positif dengan pengikutnya.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Binawati (2022) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang

memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif. Pengendalian internal ini dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat ditekan. Pengendalian internal tidak hanya menyangkut masalah penelaahan atas catatan, tetapi juga meliputi penilaian atas berbagai fungsi operasional dalam suatu perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengendalian internal yang baik yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaannya

Fungsi pokok audit internal berkisar pada kebutuhan ulasan terhadap sistem pengendalian internal disamping aktivitas audit lainnya, pemahaman yang memadai atas pengendalian dan cara pengendalian harus diaplikasikan dalam praktik merupakan keterampilan yang penting dan butuh beberapa tahun untuk mempelajarinya. Pengendalian internal biasanya mutlak diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal secara baik tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya. Sistem pengendalian internal akan dijumpai dalam perusahaan, dimana kategori ukuran bisnisnya adalah menengah ke atas.

Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang

digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, demikian juga pengendalian internal untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen (Kuntandi, *et al.*, 2022).

Bahkan tidak hanya dari segi operasional akan berjalan tertib dan baik, akan tetapi dari segi finansial juga dapat lebih termonitor dengan baik. Pada dasarnya, faktor efisiensi dan efektivitas unit/perusahaan merupakan dua hal yang juga merupakan sasaran diterapkannya pengendalian internal sebab, jika pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kemungkinan besar (hampir dapat dipastikan) akan timbul yang namanya inefisiensi (pemborosan sumber daya), yang pada akhirnya akan membani tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan. Tujuan dari pengendalian internal tidak lain untuk memberikan jaminan yang memadai, bahwa:

Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan

penyelewengan, pencurian dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenang dan kepentingan perusahaan.

Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian). Karyawan telah menaati hukum dan peraturan, salah satu yang paling riskan dalam pengendalian internal, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan ini merupakan tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contoh, bentuk kecurangan karyawan yang sering dilakukan dan hampir selalu dijumpai pada sebagian besar perusahaan yakni melaporkan biaya perjalanan dinas dan penggantian pengobatan melebihi dari jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan.

2.1.5 Komitmen Karyawan

Komitmen karyawan adalah suatu kondisi dimana pegawai memiliki unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dalam tujuan organisasi. Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku individu dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Hal ini berdasarkan cara pengembangan tujuan dalam memenuhi kebutuhan organisasi yang pada intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi Fibriyani, *et al.*,(2021).Terdapat tiga komponen komitmen yaitu sebagai berikut :

- 1) Komitmen Efektif (*Affective commitmen*)

Komitmen efektif ini adalah proses perilaku dimana seseorang mempertimbangkan hubungan mereka dengan organisasi dalam hal kesesuaian nilai-nilai pribadi mereka yang secara langsung mempengaruhi keinginan mereka untuk tetap bersama organisasi.

2) Komitmen Kontinu (*Continuance commitment*)

Komitmen Kontinu didasarkan pada ikatan dalam hubungan dengan anggota organisasi pemerintah, dan karyawan didorong oleh organisasi karena biaya (ekonomi, sosial, dan hubungan status) yang dikeluarkan ketika meninggalkan organisasi pemerintah. Biaya memanifestasikan dirinya dalam dua cara yang berbeda. Pertama, percaya bahwa masa jabatan individu dalam organisasi pemerintah menumbuhkan loyalitas, terutama karena adanya skema pensiun, senioritas, spesialisasi keterampilan, afiliasi dan ikatan keluarga dan cenderung tidak membahayakan jika berganti organisasi. Kedua, individu mungkin merasa sedang mempertimbangkan untuk tinggal di organisasi karena tidak ada pekerjaan lain yang menjanjikan.

3) Komitmen Normatif (*Normative commitment*)

Keinginan karyawan untuk tetap berada di organisasi, yang mungkin disebabkan oleh budaya individu atau etos kerja dimana karyawan dituntut untuk tetap berada di organisasi karena komitmen terhadap tugas yang diberikan kepada bawahan meningkat. Dengan demikian, loyalitas untuk bekerja yang mendasari tugas normatif manajer publik mempengaruhi individu untuk tetap berada di organisasi tempat mereka bekerja. Di sisi lain, loyalitas tugas, yang

mendasari komitmen normatif, mempengaruhi individu untuk bertahan dalam organisasi.

2.1.6 Tingkat Pemahaman Akuntansi

Menurut kamus umum bahasa Indonesia paham memiliki arti pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman memiliki arti proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman akuntansi dapat diartikan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik, untuk lebih memahami akuntansi lebih luas dan menangkap lebih baik, mengetahui prosedur dan sistem akuntansi, standar akuntansi yang berlaku, kebijakan akuntansi serta bisa memahami komponen-komponen laporan keuangan yang nantinya dihasilkan oleh setiap entitas baik dalam entitas akuntansi maupun entitas pelaporan (Fibriyani, *et al.*, 2021).

Berdasarkan pedoman prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan seseorang dapat dikatakan paham terhadap akuntansi yaitu pandai dan mengerti mengenai proses penyusunan akuntansi dilakukan sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menurut Atika, *et al.*, (2019), pengertian pengetahuan akuntansi dapat dilihat dari dua sisi yang pertama yaitu sebagai disiplin pengetahuan berdasarkan yang didapat di perguruan tinggi, kemudian sebagai pengetahuan profesi (keahlian) seperti yang dipraktekan di dunia nyata.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan komponen laporan keuangan terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2) Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

3) Laporan Arus Kas (LAK)

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Laporan Operasional (LO)

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE Neraca, LAK. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Adapun proses atau siklus akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

a. Transaksi

Transaksi adalah kesepakatan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dengan pihak lain, transaksi ini kemudian tercermin dalam laporan keuangan organisasi.

b. Analisis bukti transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi

tersebut, dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

c. Mencatat Data Transaksi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

d. Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan

Data yang dicatat (Posting) dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing, hal inilah yang disebut dengan posting.

e. Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

2.1.7 Fungsi Badan Pengawas

Salah satu faktor yang mempengaruhi dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan adanya fungsi badan pengawas. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai usaha, tindakan dan

kegiatan yang ditujukan untuk menanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel maka pemerintah harus meningkatkan peran dan fungsi dari badan pengawas internal keuangan daerah, dalam penelitian ini badan pengawas internal keuangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang di danai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada badan pemeriksa keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 Pasal 6 (5) berbunyi kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota.

Adapun ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Audit/pemeriksaan regular atau berkala terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Audit/pemeriksaan tematik terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
3. Audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, audit/pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik.
5. Audit laporan keuangan di SKPD.
6. Audit kinerja SKPD.
7. Audit tujuan tertentu SKPD.
8. Review terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
9. Evaluasi terhadap Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan pemeriksaan keuangan.
11. Monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

12. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Sinarantana, *et al.*, (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kecamatan Penebel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kecamatan Penebel.

Darwis & Meliana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul ” Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Veliani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Etika Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, etika dan gaya kepemimpinan dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, etika dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Fibriyani, *et al.*,(2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kab. Gianyar”. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah OPD Kab. Gianyar. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menghasilkan bahwa variabel pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kab. Gianyar.

Nugraha, *et al.*,(2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung”.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu kompetensi pegawai dan komitmen organisasi dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Bandung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai dan komitmen organisasi memang memiliki pengaruh positif terhadap keandalan dan tepat waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pratiwi, *et al.*,(2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, profesionalisme, dan etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Marga. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme dan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Marga.

Andari, *et al.*,(2022) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh”. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas, tingkat pemahaman akuntansi dan budaya organisasi dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini yaitu seluruh

LPD yang ada di kecamatan Blahbatuh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menghasilkan bahwa variabel kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Desa Blahbatuh.

Wati (2022) dalam penelitiannya yang berjudul ” Analisis faktor – faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem”. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu etika kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, tingkat pemahaman akuntansi, komitmen karyawan dan fungsi badan pengawas, dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini yaitu seluruh OPD di kecamatan Karangasem. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian ini yaitu etika kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia dan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan , sedangkan komitmen karyawan dan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karangasem.

Rahayu & Kanita (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Objek penelitian ini adalah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menghasilkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yaitu sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Provinsi DKI Jakarta.

Sutandi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Manajemen Resiko, Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, dan Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di LPD Kecamatan Sukawati.”. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu tingkat pemahaman akuntansi, manajemen resiko, sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas, dan etika kepemimpinan dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah LPD Kecamatan Sukawati. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi, manajemen resiko, fungsi badan pengawas, dan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah digunakan, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yaitu etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal, komitmen karyawan, tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas sedangkan variabel dependen pada penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu kualitas laporan keuangan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu pada SKPD. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada waktu pelaksanaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan juga berbeda.

